

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adhayanto, Oksep. *Metode Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Cetakan II. Tanjungpinang: Umrah Press, 2016.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022 Pembinaan Hukum Di Daerah*. Jakarta Timur: Percetakan Pohon Cahaya, 2022.
- Dayanto, and Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pembentukan*. Malang: Setara Press, 2019.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*. Jakarta: Japan Internasional Cooperation Agency, 2022.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Edited by Bahtiar. Mataram: Sanabil, 2022.
- Hamidi, Jazim. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*

- (Edisi Revisi). Ambon: Mirra Buana Media, 2020.
- Mardalis. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Cetakan 13. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Mardani. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Nalle, Victor Imanuel W. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Penyusunan*. Cetakan ke. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Saleh, Linda F. *Konstruksi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Tatanan Negara Hukum Yang Demokratis*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Suhariyono. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Pedoman Praktis*. Jakarta: PapasSinar Sinanti, 2022.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Tjoman, Andreas Andri Lensoen. *Norma Hukum Transplantasi Jantung Di Indonesia*. Edited by Tina Amelia. Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2022.
- Utsman, Sabian. *Dasar Dasar Sosiologi Hukum*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Zuhro, R. Siti, and Eko Prasojjo. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah Dan Solusinya*. Yogyakarta: The Habibie Center, 2010.

B. Jurnal

- Adhayanto, Oksep. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015).
- Andrivand. "Pengujian Perkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016." *Unes Law Review* 5, no. 1 (2023).
- Aritonang, Ririn Agustin. "Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik Norma." *Hangoluan Law Review* 2, no. 1 (2023).
- BN, Hermi Sari, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22 2, no. 16 (2020).
- Cerdas, Felani Ahmad, Ali Abdurahman, and Indra Perwira. "Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022).
- Diana Tantri, Cahyaningsih. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *Journal Rechts Vinding Online*, 2020.
- Dwiatmoko, Anang, and Harsanto Nursadi. "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 292–306.
- Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Volksgeist* 3, no. 2 (2020).
- Hartono, Hasim. "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Konawe (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2019).
- Hilala, Tri Oktavia, Marwan Djafa, and Hijrah Lahaling. "Kewenangan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Di Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023).
- M, Mohd. Yusuf Daeng, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Manik, Asianna, Nabila Amanda Pulungan, Alya Rachma, Erbina Br. Sembiring, Risky Sakti Lumban Gaol, Ramsul Nababan, and Maulana Ibrahim. "Analisis Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *ALADALAH:*

Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 1, no. 1 (2024).

Nirmala, Nyoman Yosi Andhika, Dani R. Pinasang, and Donna O. Setiabudhi. "Pelaksanaan Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).

Pratiwi, Indah, Yuliandri, and Dian Bhakti Setiawan. "Pengharmonisasian Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi RanPerda Dan RanPerkada Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024).

Sutriyanti. "Penataan Kelembagaan Legislasi Pemerintah Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Prodigy* 11, no. 2 (2023).

Tanggono, Claustantianus Wibisono, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas Di Pemerintah Daerah." *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (2023).

Winajat, Winajat, Syahrul Borman, and Dudik Jaya Sidharta. "Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tugas Dan Fungsi Kementerian Pada Pasal 99a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025).

C. Makalah

Biro Pengkajian. "Strategi Perampangan Dan Harmonisasi Regulasi Pusat Dan Daerah, Badan Pengkajian MPR Dan Asosiasi Pengajar HTN-HAN." Jakarta, 2017.

D. Skripsi

Jaelani, Jejen. "Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah." Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2020.

E. Internet

Alief, Bisma. "Kemendagri: 3.000-an Perda Dibatalkan Karena Inkonsisten." DetikNews, 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3235125/kemendagri-3-000-an-Perda-dibatalkan-karena-inkonsisten>.

Dwi, Anugrah. "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum." pascasarjana.umsu.ac.id, 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia sebagai negara hukum>

memiliki, yang berlaku di wilayah NKRI.

- Fiska. “Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, Dan Aspek Pemicunya.” Gramedia.com, n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.
- Humas FH UPNVJ. “Pentingnya Penguasaan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Disampaikan Oleh Dosen Dan Koordinator Bagian Hukum Tata Negara FH UPNVJ Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H. Dalam Legis Lative Drafting Training Intermediate Level.” Fakultas Hukum UPV “Veteran” Jakarta, 2024. <https://hukum.upnvj.ac.id/pentingnya-penguasaan-teknik-penyusunan-peraturan-perundang-undangan-dosen-koordinator-htn-fh-upnvj-dr-ahmad-ahsin-thohari-s-h-m-h-mengisi-materi-legislative-drafting-training-intermediate-level/>.
- Jobstreet tim konten. “Profesional Adalah: Arti, Etika, Contoh, Dan Cara Meningkatkan.” Jobstreet by seek, 2024. <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/profesional-adalah-arti-etika-contoh-cara-meningkatkan>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” n.d. <https://kbbi.web.id/harmonisasi>.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kepulauan Riau. “Sekilas Kantor Wilayah.” kepri.kemenkumham.go.id, 2023. <https://kepri.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>.
- . “Tugas Pokok Dan Fungsi.” kepri.kemenkumham.go.id, 2023. <https://kepri.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- . “Sejarah Kementerian Hukum Dan HAM.” [kemenkumham.go.id](https://www.kemenkumham.go.id), 2017. <https://www.kemenkumham.go.id/tentang-kemenkumham-ri/sejarah-kemenkumham-ri>.
- Oktara, Sari Dewi. “Implikasi Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Terhadap Rancangan Perda.” Oerban.com, 2024. <https://oerban.com/implikasi-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-terhadap-rancangan-Perda/>.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. “Tentang Kepri Profil Singkat Provinsi Kepulauan Riau.” <https://kepriprov.go.id/>, n.d. <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>.
- Putra, Antoni. “Yang Terlupakan Dalam Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” pshk.or.id, 2019.
- Sjarif, Fitriani Ahlan. “Memaknai Harmonisasi Peraturan Di Indonesia.” HukumOnline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/>.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257).

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 476).

Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86).

Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 13).

Peraturan Bupati Lingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 131).

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1157).

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 484).

Peraturan Bupati Bintan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 63).

G. Keputusan

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

